



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Balat Kota No. 4 Kendari 93111 Telp. (0401) 3121443 Fax. (0401) 3122676

Kendari, 14 April 2021

Nomor : 005/525/DKP/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Peserta

Kepada Yth
(Daftar Undangan Terlampir)
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan bersama perikanan (Co-Management Fisheries) tuna, tongkol dan cakalang di wilayah pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan meningkatkan peran dari industri didalamnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bekerjasama dengan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) dan Yayasan IPNLF Indonesia (YII), mengundang Bapak/Ibu pada Pertemuan Pendahuluan Pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBPP) Tuna, Tongkol dan Cakalang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan diselenggarakan secara tatap muka (offline) dan daring (online) via aplikasi Zoom pada,

Hari, Tanggal : Kamis, 22 April 2021
Jam : 13.30 WITA – selesai
Lokasi : Swiss Belhotel Kendari dan Daring (online)
Zoom ID : 87607095185
Password : kpbpsultra
Link Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/87607095185>

Untuk konfirmasi kehadiran dan/atau apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang kegiatan ini, silakan menghubungi Sdr/i Abdul Kadir, A.Pi.,M.Si (0853-9649-8181) (PiC dari DKP Sultra) atau Sdri. Nuriasih Nababan (0852-1604-2493) (PiC dari AP2HI). Diharapkan konfirmasi kehadiran Bapak / Ibu paling lambat tanggal 21 April 2021. Untuk peserta dari luar Kota Kendari, Panitia menyediakan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung (ToR terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas
ODE KARDINI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIR. 19680714 199703 1 005

Kerangka Acuan Kegiatan

Pertemuan Pendahuluan Pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) Perikanan Tuna, Tongkol dan Cakalang Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari, 14 April 2021

I. Latar Belakang

Asosiasi Perikanan *Pole & Line* (PL) dan *Handline* (HL) Indonesia (AP2HI) lahir setelah adanya pembicaraan tentang kebutuhan wadah untuk pengembangan perikanan tuna berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2013. AP2HI didirikan atas dasar kebutuhan para pelaku industri *Pole & Line* (PL) dan *Handline* (HL) di Indonesia untuk menyatukan suaranya di dalam suatu wadah agar dapat berusaha secara sehat dan berkelanjutan dan mempromosikan perikanan hupate dan pancing ulur sebagai salah satu alat penangkapan yang berpeluang mendapatkan sertifikat ekolabel, sosial dan sertifikat lainnya sesuai trend permintaan pasar internasional saat ini.

Ikan utama yang tertangkap dengan menggunakan alat tangkap hupate dan pancing ulur adalah ikan tuna dan cakalang. Mengingat ikan tuna dan cakalang yang menjadi target kita ini merupakan ikan target yang beruaya jauh (*highly migratory fish*) melintasi area, baik Zona Ekonomi Eksklusif dari satu atau lebih negara dan laut lepas, maka pengelolaan ikan target ini harus dilakukan melalui kerjasama secara regional dan/atau internasional. Indonesia sudah tergabung secara resmi pada keanggotaan organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional, antara lain *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) dan *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT).

Pasar internasional, contohnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, saat ini sudah mulai memperhatikan keberlanjutan dari ikan target. Selain itu, kesadaran pasar untuk memperhatikan ketertelusuran (*traceability*) produk juga menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk menembus akses pasar internasional yaitu dengan memperoleh salah satu sertifikat ekolabel yang menjadi standar, contohnya adalah *Marine Stewardship Council* (MSC). Salah satu standar untuk mendapatkan sertifikat tersebut adalah adanya peran dari multi-stakeholder terkait untuk pengelolaan perikanan tuna dan cakalang, terutama di area Provinsi Sulawesi Tenggara. Atau biasa disebut dengan Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management*).

Pengelolaan bersama perikanan ini sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait karena konsep dari pengelolaan bersama mengutamakan kepentingan bersama dan dapat membangun pengelolaan yang lebih baik dan efektif. Mulai dari prinsip pengelolaan bersama, pemangku kepentingan yang dilibatkan, ruang lingkup yang akan dikerjakan. Pengelolaan bersama juga tidak terlepas dari ketersediaannya data dan informasi perikanan yang menjadi dasar pengelolaan perikanan. Dan dari sisi permintaan pasar internasional, data dan informasi ketertelusuran produk perikanan sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat ekspor.

Di beberapa Provinsi lainnya sebagai contoh juga telah terbentuk suatu wadah pengelolaan bersama perikanan ini berupa komite di mana para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi di perikanan mereka dan juga menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, antara lain di Provinsi Provinsi Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

II. Tujuan Pertemuan

1. Memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai manfaat pengelolaan bersama perikanan ini berbasis data dan informasi, serta memperluas pasar penjualan produk perikanan.
2. Membagikan pengalaman (*Success Story*) kepada pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Sulawesi Tenggara dari anggota komite di provinsi lainnya.
3. Mengajukan komitmen dari masing-masing calon anggota komite untuk turut serta aktif dalam pengelolaan perikanan ini melalui komite yang akan dibentuk.

III. Hasil yang Diharapkan

1. Para pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Sulawesi Tenggara paham akan manfaat pengelolaan bersama perikanan ini berbasis data dan informasi, serta memperluas pasar penjualan produk perikanan.
2. Para pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan bersama yang telah dilakukan oleh provinsi lainnya.
3. Para pemangku kepentingan perikanan tuna, tongkol dan cakalang di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan komitmennya untuk turut serta aktif dalam pengelolaan perikanan ini melalui komite yang akan dibentuk.

IV. Waktu dan Tempat

Pertemuan pendahuluan ini rencananya diadakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 22 April 2021
 Waktu : 13.30 WITA – selesai
 Lokasi : Swiss Belhotel Kendari dan Virtual via aplikasi Zoom
 Zoom ID : 87607095185
 Link : <https://us02web.zoom.us/j/87607095185>
 Password : kpbpsultra

V. Agenda

Jam	Deskripsi	Pembicara
13.30 – 13.45	Offline: Pendaftaran sudah dibuka Online: Ruang Zoom sudah dibuka	AP2HI
13.45 – 14.00	Pembukaan: - Pembacaan do'a - Menyanyikan lagu Indonesia Raya	MC
14.00 – 14.15	Sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Dinas Kelautan dan

		Perikanan Prov. Sultra
14.15 – 14.45	Penyampaian Materi (AP2HI): “Pengelolaan Bersama Perikanan Berbasis Data dan Informasi, serta Peluang dalam Peningkatan Pasar Internasional melalui Sertifikasi Ekolabel.”	Janti Djuari
14.45 – 15.15	Penyampaian Materi (PSDI-KKP): “Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan terhadap Pengelolaan Perikanan Provinsi”	Direktorat PSDI, DJPT, KKP
15.15 – 15.30	Berbagi pengalaman (KPBP Prov. Sulawesi Selatan)	Ketua KPBP Prov. Sulawesi Selatan
15.30 – 16.00	Penyampaian Materi (MDPI) “Penguatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Perikanan Tuna di Provinsi”	Direktur Eksekutif Yayasan MDPI
16.00 – 16.30	Sesi Tanya Jawab	Moderator
16.30 – 17.30	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen calon anggota komite • Pembuatan <i>timeline</i> dan rencana kerja komite • Kesimpulan 	Moderator
17.30 – 18.00	Penutupan sekaligus buka puasa bersama	MC

VI. Daftar Undangan

Pemerintah Daerah

1. DKP Provinsi Sulawesi Tenggara (5 orang)
2. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari (1 orang)
3. Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau (1 orang)
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton (1 orang)
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi (1 orang)
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka (1 orang)
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara (1 orang)
8. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (1 orang)
9. Kepala UPDT TPI-PPI Sodohoa – Kota Kendari (1 orang)
10. Kepala Satuan Pengawasan SDKP Kendari (1 orang)
11. Kepala KSOP Kelas II Kendari (1 orang)
12. Direktur POLAIRUD POLDA Sulawesi Tenggara (1 orang)
13. Kepala BKIPM Provinsi Sulawesi Tenggara (1 orang)
14. Ketua Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (1 orang)

Pemerintah Pusat

15. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP (1 orang)

Akademisi/Universitas

16. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Halu Oleo (1 orang)
17. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - Universitas Muhammadiyah Kendari (1 orang)

Industri/Pelaku Usaha Swasta

18. PT. Dharma Samudera Fishing Industries (1 orang)
19. PT. Patria Perikanan Lestari Indonesia (1 orang)
20. PT. Sultratuna Samudra (1 orang)
21. PT. Arta Mina Tama (1 orang)
22. PT. Abadi Makmur Ocean (1 orang)
23. PT. Edmar Mandiri Jaya (1 orang)
24. PT. Jala Naipospos Makmur (1 orang)
25. PT. Timorindo (1 orang)
26. PT. Triko Bina Nusantara (1 orang)
27. PT. Yanagi Histalaraya (1 orang)
28. PT. Pahala Bahari Nusantara (1 orang)
29. PT. Aneka Tuna Indonesia (1 orang)

Asosiasi, Organisasi Lokal lainnya

30. AP2HI (3 orang)
31. Yayasan IPNLF Indonesia (1 orang)
32. RARE Indonesia (1 orang)
33. Yayasan MDPI (1 orang)

VII. Pembiayaan

Pertemuan ini akan diadakan secara tatap muka (offline) dan daring (online) melalui aplikasi zoom. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari pendanaan AP2HI dan Yayasan IPNLF Indonesia dan mengikuti standar keuangan AP2HI dan Yayasan IPNLF, sehingga panitia hanya menanggung dengan rincian berikut,

1. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan akademisi/universitas (khusus dari luar Kota Kendari) akan ditanggung: (1) tiket pesawat (PP) kelas ekonomi; (2) tiket kapal cepat (PP); (3) bensin sesuai struk (4) akomodasi 1 malam dan konsumsi selama pertemuan; (4) uang harian selama 2 hari.
2. Pemerintah Daerah dan Akademisi/Universitas (dalam Kota Kendari) akan diberikan Perdiem berdasarkan ketentuan AP2HI.
3. Industri/pelaku usaha dan asosiasi, organisasi lokal lainnya, akan ditanggung paket pertemuan (sajian berbuka puasa) selama kegiatan.